

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dimulai dari pertanyaan "Bagaimana kebijakan SEC Amerika Serikat menjadi alat pendorong kekuatan struktural dalam sistem *cryptocurrency* internasional?" dengan studi kasus El Salvador dari tahun 2021 hingga 2025. Hasil utama dari studi ini menunjukkan bahwa SEC berfungsi sebagai instrumen kekuatan struktural dan beroperasi melalui mekanisme yang mengatur akses, standar, dan legitimasi dalam ekosistem keuangan global, yang masih sangat terpusat pada Amerika Serikat (Strange, 1988).

Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dimensi kekuatan struktural, posisi Amerika Serikat dalam arsitektur keuangan global menempatkan regulasi domestiknya sebagai acuan dan batas operasional bagi pelaku global. Kekuatan struktural, menurut Strange, tidak selalu muncul sebagai paksaan langsung, tetapi sebagai kemampuan untuk membentuk aturan permainan, mendefinisikan apa yang dianggap normal, sah, dan kredibel dalam sistem (Strange, 1988). Pada titik ini, SEC menjadi institusi yang menghasilkan parameter legalitas, standar kepatuhan, dan mekanisme disiplin pasar yang kemudian "diterjemahkan" secara global sebagai prasyarat untuk partisipasi dalam pasar modal, likuiditas, dan reputasi. Oleh karena itu, dampak SEC tidak perlu diterapkan langsung pada El Salvador untuk tetap menimbulkan dampak eksternal dalam ruang kebijakan negara tersebut.

Kedua, studi ini mengklaim bahwa lingkungan domestik El Salvador, terutama kondisi dolar sejak tahun 2001, memperkuat kerentanan struktural ketika negara tersebut mencoba berinovasi secara moneter melalui Bitcoin. Dolarisasi mengurangi kapasitas kebijakan moneter domestik dan meningkatkan ketergantungan pada stabilitas makro, akses ke pembiayaan eksternal, dan persepsi risiko dari pelaku eksternal. Ketika El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada tahun 2021, tindakan tersebut terjadi di tengah sistem keuangan yang masih sangat bergantung pada dolar dan sistem pembayaran konvensional. Dengan kata lain, meskipun Bitcoin memiliki narasi desentralisasi, efek dari kebijakan tersebut tetap berinteraksi dengan node yang diatur oleh pusat keuangan global.

Ketiga, melalui tindakan bicara dan sekuritisasi, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan SEC tidak hanya beroperasi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai pembingkai dan pelabelan yang menggambarkan aset kripto sebagai risiko terhadap integritas keuangan. Menurut kerangka Sekolah Kopenhagen, sekuritisasi melalui tindakan bicara yang memindahkan isu dari wilayah kebijakan normal ke area yang bermasalah, yang pada gilirannya membuat reaksi kuat dan kontrol yang lebih ketat menjadi dibenarkan (Buzan et al., 1998). Dalam studi ini, penunjukan tersebut menciptakan ruang untuk legitimasi pembangunan disiplin regulasi, serta untuk membangun lingkungan berbasis reputasi yang dapat mempengaruhi respons pasar dan institusi terhadap kebijakan Bitcoin El Salvador.

Keempat, penelitian ini, dengan merujuk pada ketergantungan yang dipersenjatai, menjelaskan bahwa ketergantungan yang berat pada jaringan global dapat menghasilkan efek koersif ketika jaringan tersebut berpusat pada hub tertentu. Seperti yang disoroti oleh Farrell dan Newman, negara-negara di pusat negara-negara yang terhubung diposisikan untuk memanfaatkan ruang potensial ini melalui mekanisme pengawasan, pembatasan, dan tekanan (Farrell & Newman, 2019). Dalam hal ini, SEC adalah contoh alat dalam kotak peralatan yang mengontrol akses gerbang ekosistem kripto dalam sistem keuangan arus utama terutama melalui regulasi perantara, standar kepatuhan, dan saluran integrasi pasar. Konsekuensinya adalah bahwa insentif muncul di mana pelaku di seluruh dunia didorong untuk mengadopsi standar yang berasal dari pusat sistem sehingga kebijakan moneter inovatif dari negara kecil tidak sepenuhnya terisolasi dari konsekuensi struktural.

Kelima, studi ini juga menunjukkan bahwa strategi "menjinakkan" inovasi moneter tidak berakhir dengan kerangka regulasi domestik, tetapi muncul melalui integrasi tekanan institusional di bawah multilateralisme. Diskusi dalam Bab III menggambarkan hubungan antara narasi kerangka risiko/kepatuhan, tekanan institusional dari IMF dalam hal kebutuhan pembiayaan dan kredibilitas makroekonomi, dan sektor keuangan. Dinamika setelah negosiasi IMF setidaknya dari tahun 2024 hingga 2025 menunjukkan penyesuaian material lebih lanjut terhadap perubahan kebijakan seperti penerimaan Bitcoin di sektor swasta menjadi sukarela, penguatan aspek tata kelola dan transparansi, dan penyesuaian infrastruktur kebijakan Chivo. Modifikasi ini mungkin lebih lanjut memiliki efek untuk proyek-proyek yang terhubung dengan agenda Bitcoin (seperti Bitcoin City

dan Volcano Bonds) yang berkembang di tengah lingkungan kebijakan yang berkembang menuju stabilitas yang lebih besar, serta kepercayaan pembiayaan.

Secara keseluruhan, tanggapan dari penelitian ini sepakat bahwa kebijakan SEC berfungsi sebagai instrumen kekuatan struktural karena bergerak melalui dua mekanisme yang saling memperkuat. Jalur struktural keuangan, yaitu bagaimana pelaku pasar memiliki akses dan biaya kepatuhan, adalah arah pertama. Jalur kedua adalah jalur struktural pengetahuan, yang membimbing definisi hukum dan persepsi risiko. Kedua faktor ini berinteraksi dengan sistem ketergantungan global serta tekanan institusional, sehingga ruang kebijakan negara kecil seperti El Salvador pada tingkat implementasi inovasi keuangan menjadi terbatas, meskipun inovasi ini disajikan sebagai alternatif dari sistem tradisional.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan penelitian, ada banyak rekomendasi yang dapat dibuat terkait regulasi, kelembagaan, fiskal, teknis, komunikasi publik, dan konektivitas ke dalam jaringan keuangan internasional. Pertama, sejumlah negara yang mencari kebijakan aset digital nasional harus fokus pada kesiapan tata kelola dan kepatuhan sebagai dasar mereka melalui fase implementasi kebijakan ekspansi oleh pemerintah. Tahap kesiapan ini melibatkan pembentukan rezim regulasi yang solid dan operasional mengenai status hukum aset digital, otoritas badan pengawas, dan tingkat tanggung jawab negara serta pelaku bisnis. Aturan-aturan ini harus disertai dengan ketentuan perlindungan konsumen yang substansial, termasuk kewajiban pengungkapan risiko, prosedur penanganan sengketa, mekanisme pengembalian dana ketika transaksi gagal, dan pengaturan

perlindungan untuk memastikan privasi data pribadi. Secara bersamaan, penguatan integritas keuangan juga perlu mencakup penegakan standar anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, di bidang kewajiban identifikasi pengguna, pencatatan transaksi, pelaporan transaksi mencurigakan, dan koordinasi lintas lembaga otoritas moneter, otoritas pasar keuangan, penegak hukum, dan unit intelijen keuangan. Selain pengaturan normatif yang diperlukan, pemerintah juga perlu mempersiapkan kekuatan pengawasan yang realistis (misalnya, persyaratan kepatuhan yang fleksibel, sistem pelaporan yang terstandarisasi, penegakan yang konsisten), sehingga sinyal regulasi tidak memudar dan menyebabkan ketidakpastian.

Kedua, rencana aset digital, di mana negara menjadi kunci, harus disertai dengan risiko makro dan fiskal yang terukur, mengikuti bukti bahwa tekanan eksternal umumnya berasal dari reputasinya, persepsi risiko, dan aksesnya ke pembiayaan. Pemerintah perlu menetapkan batas eksposur sektor publik yang jelas, seperti batas kepemilikan aset, batasan komitmen pembelian, dan pemisahan neraca lembaga publik serta fluktuasi nilai mata uang kripto. Semua tindakan terkait kebijakan seperti akuisisi teknologi, insentif keuangan, dukungan biaya transaksi keuangan, dan manajemen aset harus dilakukan dalam konteks akuntabilitas yang dapat diaudit dan pelaporan berkala yang transparan untuk mencegah munculnya kewajiban kontinjensi yang tidak terhitung. Selain itu, penting juga untuk menyiapkan rencana manajemen krisis termasuk ketika terjadi peningkatan volatilitas, gangguan sistem, serangan siber, atau penarikan dana massal, sehingga pemerintah memiliki protokol sederhana tentang cara merespons tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal dan kredibilitas dalam mengadopsi

kebijakan. Bagi negara-negara yang terlalu bergantung pada dolar atau pembiayaan luar, kebijakan aset digital juga harus mencerminkan tujuan stabilitas makro yang lebih luas seperti kepastian pembayaran pajak, disiplin fiskal, dan koherensi kebijakan, agar ruang negosiasi dan akses ke pembiayaan tidak semakin ketat.

Ketiga, pemerintah harus bekerja untuk memastikan kebijakan, terutama yang diterapkan pada sektor publik, tidak bergantung pada volatilitas pasar dan tidak menempatkan pengguna di bawah tekanan yang tidak semestinya. Sementara negara menjalankan dompet digital atau sistem pembayaran seluler berbasis aset digital, desainnya perlu dirancang dengan fokus utama pada keandalan layanan, keamanan siber, dan perlindungan pengguna. Ini melibatkan segala sesuatu mulai dari standar keamanan hingga tata kelola administrator sistem hingga kebijakan pemulihan akun, dukungan layanan pelanggan, dan mekanisme kompensasi dalam kasus kegagalan sistem atau penipuan. Pemerintah masih perlu dapat menyediakan jalur penggunaan ke sistem (pembayaran) resmi dan memberikan opsi pembayaran yang stabil kepada publik sehingga program publik tidak ditangguhkan atau ditunda karena pengembangan kebijakan baru di satu sisi, atau perubahan kondisi pasar di sisi lain.

Pada tingkat sosial, kebijakan literasi keuangan dan literasi digital harus diintegrasikan ke dalam implementasi ini, bukan hanya sebagai tambahan, karena keberhasilan kebijakan akan bergantung pada sejauh mana pemahaman pengguna, tingkat kepercayaan di domain publik, dan seberapa baik komunitas dapat mengelola risiko. Pada saat yang sama, komunikasi tentang kebijakan diperlukan

untuk menjaga konsistensi dan bergantung pada data objektif, yang mencakup deskripsi tujuan kebijakan, batasannya, serta risiko dan kewajiban masing-masing pihak, bahwa legitimasi kebijakan perlu lebih dari sekadar narasi, tetapi juga kejelasan operasional & kemungkinan perlindungan publik tercapai